

EVALUASI PERAN KOMITE SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN 1 BANGKO PUSAKO)

Satria¹⁾

Hasnah Faizah AR²⁾

Zulkarnain³⁾

¹⁾Post Graduate Student of Riau University

²⁾Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

³⁾Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

ABSTRACT: The school committee is a body or a non-profit and non-political, in the form based on consultation and democratic by education stakeholders at unit level of education as a representation of the various elements responsible for the improvement of the quality of the process and outcomes of education. The school committee was formed to facilitate and increase the participation of the stakeholders of the school to participate in formulating, establish, implement, and monitor implementation of school policy and accountability that focuses on quality of service to learners are proportionate and open. This study aims to reveal the exact role will be undertaken by a committee of SMAN 1 Bangko Pusako accordance with Kepmendiknas No. 044 / U / 2002 which states that the school committee acts as a conduit of consideration (advisory agency), support (supporting agency), controller (controlling agency), and mediator. This study used a qualitative approach with descriptive research instrument is self researchers themselves and informants, data collection techniques of documentation and interviews. These results indicate that the committee SMAN 1 Bangko Pusako not fully carry out their roles and functions in accordance with Kepmendiknas No. 044 / U / 2002. This is due to the school committee is not active and effective, the school committee does not know what is the role and function of the school committee even school committee does not have AD / ART and lack of coordination and good communication with the school. Besides the pattern of school leadership which is not transparent and does not involve the committee in any program planning and implementation and decision making result in the school committee can not play properly and effectively.

Key words: Evaluation, Strategy, School Committee

ABSTRAK: Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah di bentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sebenarnya peran yang di lakukan oleh komite SMAN 1 Bangko Pusako sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang menyatakan bahwa komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument penelitian adalah diri peneliti sendiri dan informan, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite SMAN 1 Bangko Pusako belum

sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002. Hal ini disebabkan komite sekolah tidak aktif dan efektif, komite sekolah tidak mengetahui peran dan fungsinya, bahkan komite sekolah tidak memiliki AD/ART dan tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Selain itu pola kepemimpinan kepala sekolah yang tidak transparan dan tidak melibatkan komite dalam setiap perencanaan program dan pelaksanaan serta pengambilan keputusan mengakibatkan komite sekolah tidak bisa berperan dengan baik dan efektif.

Kata Kunci : Evaluasi, Peran, Komite Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah maka sebagai realisasi dari peran serta masyarakat dibidang pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk dapat menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah wadah yang bernama generik Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000, dan sebagai implementasi dari UU No 25 tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komite sekolah dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah yang berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite sekolah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat strategis, karena Komite Sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelesaian pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan

berupa material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Selain itu Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya mengevaluasi peran komite sekolah tersebut.

Menurut Zulkifli (Jurnal Potensia Vol.14 Edisi 1 Januari- Juni 2015: 104) bahwa berkaitan dengan Komite Sekolah yang ada di Indonesia dapat kita lihat bahwa Komite Sekolah belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa gejala dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Komite Sekolah terkesan hanya papan nama.
2. Komite Sekolah hanya pelengkap organisasi.
3. Komite Sekolah hanya perpanjangan sekolah atau hanya sebagai alat pengumpul dana dari masyarakat.
4. Komite Sekolah hanya melegalisasi konsep yang sudah disusun kepala sekolah.

Dari beberapa gejala di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang peran Komite Sekolah khususnya di SMAN 1 Bangko Pusako. Hasil pengamatan sementara peneliti di lapangan, di SMA Negeri 1 Bangko Pusako semenjak sekolah ini berdiri tahun 2002 hingga saat ini komite sekolah yang ada belum berfungsi dengan baik dan bisa dikatakan pasif dalam melaksanakan perannya sesuai dengan Kepmendiknas No 44 tahun 2002. Permasalahan yang utama adalah tidak adanya regenerasi pengurus komite sekolah dan komite sekolah tidak pernah mengadakan musyawarah anggota untuk memilih dan mengganti pengurus komite semenjak komite sekolah dibentuk tahun 2002, padahal dalam Kepmendiknas tersebut masa kepengurusan komite sekolah adalah palinglama lima tahun.

Begitulah hasil wawancara singkat peneliti dengan salah seorang anggota komite di SMA Negeri 1 Bangko Pusako, melihat kondisi yang ada seperti itu maka peneliti tertarik untuk meneliti

permasalahan ini dengan mengambil judul “Evaluasi Peran Komite Sekolah (Studi kasus di SMA Negeri 1 Bangko Pusako)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan komite sekolah ini yang cukup rumit dan kompleks serta dinamis, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut di jaring dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test dan kuesioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi yang ada secara mendalam sehingga akan menemukan pola dan solusi atas permasalahan komite sekolah (studi kasus) di SMA Negeri 1 Bangko Pusako.

Creswell (2015: 59) mendefenisikan penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penafsiran yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang di kenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu aktivitas berlokasi menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat. Praktik- praktik ini mentransformasi dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, tujuannya agar peneliti bisa berfokus pada suatu unit tunggal yakni di SMAN 1 Bangko Pusako sehingga bisa menggali permasalahan komite sekolah yang ada di SMAN 1 Bangko Pusako.

Emzir (2014: 20) mengatakan bahwa penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian

dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti akan membahas peran komite sekolah berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 di SMAN 1 Bangko Pusako untuk:

1. Mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diberikan oleh Komite Sekolah dalam Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di SMAN 1 Bangko Pusako.

Dalam hal peranan komite sebagai pemberi pertimbangan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh komite sekolah menurut Zulkifli (Jurnal Potensia Vol.14 edisi 1 Januari- Juni 2015) dapat di jawab sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.

Komite belum pernah melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah, hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing pengurus komite dan pengetahuan pengurus komite tentang peran dan fungsi komite sekolah serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban pengurus komite.

2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.

Karena komite belum pernah melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat maka secara otomatis komite juga tidak pernah menganalisis hasil pendataan tersebut.

3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.

Komite sekolah belum pernah memberikan masukan, pertimbangan maupun rekomendasi

secara tertulis kepada sekolah, hal ini disebabkan karena komite sekolah semenjak dibentuk hingga sekarang tidak pernah melakukan rapat internal komite maupun rapat bersama-sama kepala sekolah dan majelis guru. Bahkan musyawarah anggota yang seharusnya dilakukan lima tahun sekali untuk pergantian pengurus komite belum pernah dilakukan, sehingga pengurus komite saat ini adalah pengurus komite semenjak tahun 2002 lalu. Namun demikian, secara pribadi ketua komite mengatakan sering memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah saat bertemu akan tetapi masukan dan pertimbangan tersebut disampaikan secara lisan.

4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum.

Dalam hal pertimbangan dalam rangka pengembangan kurikulum komite juga menyampaikan belum pernah memberikan pertimbangan kepada sekolah baik tertulis maupun secara lisan.

5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Komite sekolah menyatakan belum pernah memberikan pertimbangan secara tertulis kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, namun pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan kepada sekolah adalah berupa lisan dan pribadi ketua komite karena memang ketua komite yang sering diundang dan datang ke sekolah jika sekolah memiliki kegiatan baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sekolah yang bersifat umum.

6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk Menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan.

Dalam hal penyelenggaraan pembelajaran yang menyenangkan, komite sekolah juga hanya menyampaikan masukan dan pertimbangan berupa lisan dari pribadi ketua komite.

7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam menyusun visi dan misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah dan guru tidak pernah diundang dan diajak oleh kepala sekolah secara bersama-sama untuk membahas apa visi dan misi sekolah.

8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam menyusun RAPBS.

Masukan dan pertimbangan dalam hal penyusunan dan penetapan RAPBS, berdasarkan dokumentasi yang ada tidak ditemukan dokumentasi yang mendukung tentang adanya kegiatan rapat penyusunan dan penetapan RAPBS baik berupa notulis rapat, jurnal, maupun dokumentasi berupa foto, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus komite sekolah yang mengatakan bahwa komite sekolah tidak pernah dilibatkan dalam hal penyusunan dan membahas RAPBS tersebut. Jadi, dalam hal ini komite sekolah belum pernah memberikan pertimbangan atau masukan baik tertulis maupun lisan dalam penyusunan dan penetapan RAPBS sekolah.

Pengakuan informan (ketua komite), *“setahu saya kami komite tidak pernah di undang untuk rapat membahas visi dan misi sekolah ternasuk membahas RAPBS sekolah, tetapi saat penerimaan siswa baru saya sebagai ketua komite di undang ke sekolah untuk rapat dengan orang tua murid untuk menentukan berapa biaya yang harus dibayar orang tua murid pada sekolah, namun saya hanya tinggal membacakan RAPBS yang sudah disiapkan oleh sekolah kepada wali murid dan biasanya tanpa banyak kendala wali murid menyetujui rancangan tersebut”* (Wawancara hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 pukul 11: 23).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini terlihat dari delapan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh komite sekolah ternyata tidak

satupun dari kegiatan tersebut dilakukan oleh komite.

2. Mendeskripsikan Dukungan apa saja yang telah diberikan oleh Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMAN 1 Bangko Pusako.

Peran komite sekolah sebagai pendukung mempunyai peranan memberikan dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan telaah dokumen yang ada, tidak ditemukan dokumen baik berupa arsip, jurnal dan notulis maupun berupa foto tentang adanya pertemuan *stakeholder* sekolah dengan komite atau masyarakat. Dari hasil wawancara dengan informan maka kegiatan yang seharusnya dilakukan komite sekolah Menurut Zulkifli (Jurnal Potensia vol.14 edisi1 Januari-Juni 2015) sebagai pendukung dapat dijawab sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholders* di lingkungan sekolah.

Komite sekolah belum pernah melakukan pertemuan secara berkala baik pertemuan internal komite maupun pertemuan dengan *stakeholder* sekolah. Hal ini disampaikan oleh ketua dan pengurus komite bahwa komite sekolah tidak pernah mengundang/ diundang pihak sekolah untuk mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan majelis guru. Namun, pihak sekolah jika ada kegiatan selalu mengundang ketua komite dan ketua komite sering memenuhi undangan tersebut sehingga semua masukan dan aspirasi maupun pertimbangan disampaikan oleh ketua komite secara lisan dan sebagai pribadi ketua komite sebab semua masukan, ide dan aspirasi tidak pernah dimusyawarahkan oleh pengurus komite.

2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.

Komite sekolah belum pernah melakukan usaha untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha atau industri untuk mendukung

penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu di sekolah. Hal ini menurut peneliti disebabkan oleh kesibukan pengurus komite dan ketidakmengertian pengurus komite akan peran dan fungsinya.

3. Memotivasi masyarakat golongan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Dalam hal memotivasi masyarakat, pengurus komite menyampaikan hal itu belum pernah dilakukan oleh komite sekolah.

4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri dalam penyediaan sarana/ prasarana serta biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam hal ini komite sekolah menyatakan bahwa, belum pernah melakukan usaha untuk mendorong orang tua dan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pendidikan, seperti; dalam penyediaan sarana/ prasarana serta biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Namun selain dari empat hal di atas, dalam hal dukungan finansial yang telah diberikan komite terhadap sekolah misalnya; komite sekolah pada rentang tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 telah banyak membantu sekolah untuk membayar honor guru dan THR guru beserta staf SMAN 1 Bangko Pusako, juga memberikan uang tunai guna pembelian drum band sekolah, semua dana tersebut bersumber dari dana pribadi wakil ketua komite yang diberikan atas nama komite sekolah. Dukungan lainnya berupa lobi dan pendekatan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga dari hasil pendekatan komite tersebut SMAN 1 Bangko Pusako memperoleh proyek pembangunan jalan masuk semenisasi ke sekolah dan semenisasi lapangan upacara dan terakhir memperoleh bangunan kantor majelis guru.

3. Mendeskripsikan Bagaimana Komite Sekolah Menjalankan Perannya Sebagai Pengontrol Dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengeluaran Pendidikan di SMA Negeri 1 Bangko Pusako.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, menurut Zulkifli (Jurnal Potensia Vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015), minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan.

Berdasarkan telaah dokumen yang ada, tidak ditemukan adanya dokumen baik berupa arsip, jurnal dan notulis rapat maupun berupa foto tentang adanya usaha dari komite untuk meminta penjelasan kepala sekolah tentang hasil belajar siswa maupun tentang usaha mencari penyebab ketidakberhasilan siswa dalam belajar atau memberi dukungan tentang keberhasilan siswa.

1. Meminta penjelasan kepala sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah.
Komite belum pernah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan komite juga tidak pernah meminta penjelasan kepala sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah. Menurut peneliti, berdasarkan fakta di lapangan dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa pola kepemimpinan kepala sekolah berhasil membuat komite tidak berdaya dalam menjalankan perannya sehingga peran kontrol komite sekolah tidak berjalan karena mereka tidak dilibatkan dan tidak diberi akses dalam pengawasan.
2. Mencari penyebab ke tidak berhasil belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi ke berhasil belajar siswa.

Komite sekolah menyampaikan bahwa komite belum pernah mencari dan bertanya penyebab ke tidak berhasil belajar siswa serta memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan siswa dalam belajar.

4. Mendeskripsikan Apa Saja yang Telah dilakukan Komite Sekolah Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Mediator Antara Pemerintah Dengan Masyarakat di SMA Negeri 1 Bangko Pusako.

Berdasarkan telaah dokumen yang ada, tidak ditemukan adanya dokumentasi baik berupa arsip, jurnal dan notulis rapat maupun berupa foto tentang adanya usaha kerjasama atau MoU dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di sekolah. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh informasi untuk menjawab dua kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh komite sekolah menurut Zulkifli (*Jurnal Potensia Vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015*) tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Komite sekolah belum pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di sekolah. Hal ini disebabkan oleh komite sekolah tidak mengetahui tugas dan fungsinya karena semenjak dibentuk tahun 2002 hingga sekarang tidak pernah dilakukan sosialisasi akan tugas atau peran dan fungsi dari komite sekolah tersebut, baik oleh kepala sekolah maupun oleh dinas terkait.
2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk; menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholder* pendidikan di sekitar sekolah dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di sekitar sekolahnya.

Dalam hal menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan tuntutan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, dalam hal ini masyarakat menyampaikan secara pribadi-pribadi kepada pribadi pengurus komite namun tidak tersalurkan kepada pihak sekolah, hal ini sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan "*komite sekolah tidak pernah menyampaikan informasi atau aspirasi dari masyarakat kepada sekolah*" (wawancara 01 Februari 2017 Pukul 08:41).

Selain dari dua kegiatan tersebut peran komite sebagai penghubung antara sekolah dengan pemerintah maka yang harus dilakukan komite sekolah adalah meminta laporan kepala sekolah atau mendata tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tersebut sehingga jika terdapat kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan maka komite sekolah bisa membantu mencarikan jalan keluarnya, misalnya dengan mencarikan tenaga honor sukarela yang sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan atau bersama-sama dengan kepala sekolah mengajukan kepada dinas pendidikan setempat agar dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Peran yang seharusnya dijalankan komite sekolah berdasarkan Kepmendiknas 044/U/2002 tahun 2002 adalah:

1. Sebagai Pemberi Pertimbangan

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan peran komite sekolah seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah tidak pernah melibatkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di sekolah seperti menentukan visi dan misi sekolah dan penetapan RAPBS sekolah. Selain itu juga komite sekolah tidak aktif memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah baik diminta maupun tanpa diminta oleh sekolah, hal ini disebabkan komite sekolah sendiri tidak pernah

mengadakan rapat internal komite yang membahas masukan dan pertimbangan yang akan disampaikan pada pihak sekolah.

2. Sebagai Pendukung

Peran komite sekolah sebagai pendukung, berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan informan bahwa dari segi dukungan finansial maupun berupa sarana dan prasarana diawal berdirinya sekolah sudah berjalan dengan baik dan sangat baik serta sesuai dengan peran komite seperti yang diharapkan pemerintah karena sudah banyak dukungan yang diberikan komite sekolah kepada sekolah. Namun disisi lain dukungan pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu perhatian dari dinas pendidikan setempat.

3. Sebagai Pengontrol

Peran komite sekolah sebagai pengontrol tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah hal ini disebabkan oleh pola kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat tertutup dan tidak transparan sehingga menutup akses untuk mengontrol baik penggunaan anggaran terutama dana BOS maupun pelaksanaan program pembelajaran disekolah.

4. Sebagai Mediator

Peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung antara sekolah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik karena komite sekolah sudah bisa memberikan solusi terbaik atas permasalahan antara sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Peran komite sebagai penghubung antara sekolah dan pemerintah diawal sekolah ini berdiri sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan lobi-lobi yang di lakukan komite sekolah terhadap Dinas Pendidikan maupun DPRD setempat untuk meminta bantuan sarana prasarana sekolah dan membuahkan hasil.

Sebaiknya Dinas Pendidikan dan pemerintah setempat segera membentuk Dewan Pendidikan kabupaten sesuai amanat

Kepmendiknas 044/U/ 2002 agar bisa memberikan perhatian serius terhadap keberadaan komite sekolah, dan sebaiknya dinas pendidikan, Dewan Pendidikan dan kepala sekolah memberikan sosialisasi tentang peran dan fungsi komite sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tahun 2002 dan yang terbaru Kepmendiknas Nomor 75 tahun 2016 yang akan diberlakukan Desember 2017 sehingga dengan demikian diharapkan komite sekolah mengetahui perannya dan tahu hak serta kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah. 2009. *Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai*, Pasca Sarjana Univ.Sumatra Utara.
- Ali Hanafiah Muhi. *Eksistensi Komite Sekolah*
- Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* : Rajawali Pers.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Faturrahman. *Efektifitas Kinerja Komite Sekolah dalam Layanan Mutu Pendidikan*. IKIP Univ.Islam Lamongan.
- Fokusmedia. 2013. *Undang- Undang. Sisdiknas*. Bandung.
<https://jodenmot.wordpress.com>, di akses 21 September 2016.
- <https://www.academia.edu>, di akses 21 September 2016.
- <https://www.kumpulandefenisi.com/2015/07/>, di Akses Tanggal 16 Oktober 2016.
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek)*, Jambi: Alfabeta Bandung.
- Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor 044/ U/ 2002 Tahun 2002 Tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.

- Larasati. 2009. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang*. Univ.Negri Semarang.
- Misbah. 2009. *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Insania|Vol.14|No.1| Jan-Apr 2009|68-91.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Rasyid Dan Mansur. 2007. *Penilaian Hasil Belajar*, Bandung: Wacana Prima
- Rufaidah. 2011. *Implementasi Peranan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang*. Univ.Jember.
- Santoso. *Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Madiun*. FBBS IKIP PGRI Madiun
- Strauss & Corbin. 2015. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sani, Dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*, Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Develovment)*. Alfabeta Bandung.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*.
- Yuyus Rustandi. 2011. *Peran Motivator, Monitoring dan Evaluasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 14 Bandung*. Jurnal Ilmiah Pendidikan PEDAGOGIA, Vol.4 No.1 Tahun 2011, ISSN.
- Zulkifli. 2015. *Komite Sekolah di antara Cita dan Realita*. Jurnal Potensia Vol.14 Edisi 1 Januari- Juni 2015.